



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : YUDIKATIF

**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG

**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : FENNY TRI UTAMI
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 920432

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	----
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	158.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI	Rp.	
18.000.000		
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI	Rp.	
20.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3E MT Tahun 2017, HASIL SENDIRI		
Rp. 120.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	50.000.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	9.038.959
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	217.038.959
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	375.000.000
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	-157.961.041

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**Bukti Penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi**

Direktorat Jenderal Pajak <no-reply@pajak.go.id>  
Ke: <fennytriutami@gmail.com>

Kam, 22 Jan, 16.36



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**Direktorat Jenderal Pajak**

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id) [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

**BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)**

Nomor BPE	: <b>BPE-03152/CT/KPP.2808/2026</b>
Tanggal	: 22 Januari 2026
NPWP	: 1671024802970002
Nama Wajib Pajak	: FENNY TRI UTAMI
Jenis SPT	: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: Januari - Desember 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 22 Januari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

*Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.*

Mohon simpan email ini sebagai arsip pribadi Anda.